



**OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BONDOWOSO  
(IMPLEMENTASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT 1999–2009)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**HENDRA WIRA KUSUMA**

**NIM 060210302122**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2011**



**OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BONDOWOSO  
(IMPLEMENTASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT 1999–2009)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah (S1) dan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

**HENDRA WIRA KUSUMA**

**NIM 060210302122**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2011**

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

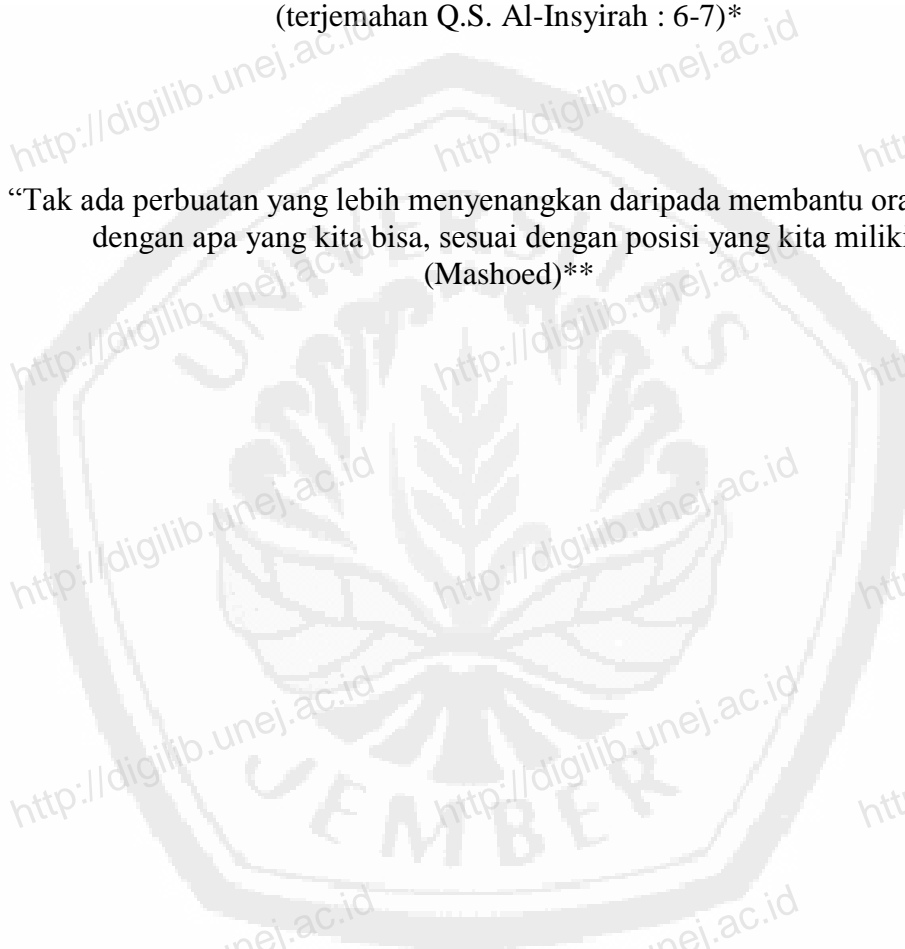
1. Ayahanda Didik Winardi, Ibunda Herlinora,
2. Guru-guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



## MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh urusan yang lain”  
(terjemahan Q.S. Al-Insyirah : 6-7)\*

“Tak ada perbuatan yang lebih menyenangkan daripada membantu orang lain,  
dengan apa yang kita bisa, sesuai dengan posisi yang kita miliki”  
(Mashoed)\*\*



---

\*) Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. Al-Quran Terjemahan. Jakarta: Al-Huda

\*\*\*) Mashoed. 2008. Selayang Pandang Perjalanan Mashoed Memimpin Bondowoso. Bondowoso.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Wira Kusuma

NIM : 060210302122

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “*Otonomi daerah di kabupaten Bondowoso (Implementasi dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat 1999–2009)*.” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Juni 2011

Yang menyatakan,

Hendra Wira Kusuma

NIM 060210302122

**HALAMAN PERSETUJUAN****OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BONDOWOSO  
(IMPLEMENTASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT 1999–2009)****SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah (S1) dan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Nama Mahasiswa : Hendra Wira Kusuma  
NIM : 060210302122  
Angkatan Tahun : 2006  
Daerah Asal : Bondowoso  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 11 November 1987  
Jurusan/program : Pendidikan IPS/Pendidikan Sejarah

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. Budiyo, M.Si  
NIP. 19570702 198601 1 001

Dr. Sutjitro, M.Si  
NIP. 19580624 198601 1 001

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul *Otonomi daerah di kabupaten Bondowoso (Implementasi dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat 1999–2009)* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada:

hari : Senin

tanggal : 6 Juni 2011

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Marjono, M.Hum

NIP. 19600422 198802 1 001

Anggota I,

Dr. Sutjitro, M.Si

NIP. 19580624 198601 1 001

Anggota II,

Drs. Kayan Swastika, M.Si

NIP. 19670210 200212 1 002

Drs. Budiyo, M.Si

NIP. 19570702 198601 1 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jember,

Drs. Imam Muchtar, SH., M. Hum

NIP. 19540712 198003 1 005

## RINGKASAN

*Otonomi daerah di kabupaten Bondowoso (Implementasi dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat 1999–2009)*; Hendra Wira Kusuma, 060210302122; 2011: 104 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah; Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Kabupaten Bondowoso ikut serta dalam proses otonomi daerah pada tahun 1999. Pembentukan Kabupaten Bondowoso didasarkan pada undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah dalam lingkungan provinsi Jawa Timur. Amanat undang-undang tersebut hanya sebatas pengelolaan pemerintahan, mata uang dan fiskal sepenuhnya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Secara geografis, Bondowoso mempunyai luas wilayah kurang lebih 1.560,10 km<sup>2</sup>. Bondowoso terdiri atas 23 kecamatan, 10 kelurahan, 209 desa dan 1.003 dusun (Litbang, 2005 : 13). Jumlah penduduk kabupaten Bondowoso pada tahun 2009 sebesar 737.807 jiwa (253.150 KK). Prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Bondowoso ada dua yaitu pelayanan kesehatan dan pariwisata. Sektor pertanian menjadi andalan dalam perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Bondowoso.

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi; 1) Bagaimanakah implementasi otonomi daerah di kabupaten Bondowoso tahun 1999-2009, 2) Bagaimana pengaruh otonomi daerah terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Bondowoso tahun 1999-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Mengkaji lebih dalam mengenai implementasi otonomi daerah di kabupaten Bondowoso tahun 1999-2009, 2) Mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh perkembangan perekonomian terhadap kehidupan masyarakat di kabupaten Bondowoso tahun 1999-2009. Manfaat dari penelitian ini yaitu; 1) Menambah khasanah pengetahuan tentang perekonomian



bagi sejarah perekonomian Indonesia, 2) Dapat menjadi bahan masukan baru dalam mengkaji pelaksanaan otonomi di suatu daerah terutama bagi pemerintah daerah kabupaten Bondowoso, 3) Sebagai media analisis permasalahan-permasalahan baru bagi peneliti lain dalam bidang ekonomi khususnya di kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu pengumpulan data (*heuristik*), kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang diperoleh dari wawancara, buku dan dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi ekonomi dan teori yang digunakan adalah perubahan sosial. Pembahasan meliputi kebijakan otonomi daerah di kabupaten Bondowoso dan pengaruh otonomi daerah terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Bondowoso tahun 1999-2009. Kebijakan otonomi daerah di kabupaten Bondowoso meliputi pelaksanaan otonomi daerah, produk peraturan daerah pemerintahan, dan implementasi kebijakan ekonomi pada masa otonomi daerah di kabupaten Bondowoso. Pengaruh otonomi daerah terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Bondowoso meliputi upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dampak diberlakukannya otonomi daerah bagi perekonomian masyarakat di kabupaten Bondowoso.

Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan pelaksanaan otonomi daerah di implementasikan dalam bentuk perumusan peraturan daerah yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan. Otonomi daerah memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada di kabupaten Bondowoso. Jumlah pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan asli daerah (PAD) terus meningkat. Akan tetapi, perhatian pemerintah daerah kepada pelaku di sektor pertanian kurang sehingga sebagian besar keluarga prasejahtera di kabupaten Bondowoso didominasi oleh pelaku di sektor pertanian. Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini yaitu kebijakan otonomi daerah berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kabupaten Bondowoso.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Otonomi daerah di kabupaten Bondowoso (Implementasi dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat 1999–2009)*.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan baik secara moral maupun materiil, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Imam Muchtar S.H, M.Hum, selaku Dekan FKIP Universitas Jember;
2. Drs. Sumarjono, M.Si selaku Ketua Jurusan P. IPS FKIP Universitas Jember;
3. Drs. Kayan Swastika, M. Si selaku Ketua Program Studi P. Sejarah Universitas Jember;
4. Drs. Budiyo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama;
5. Drs. Sutjitro, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama menyelesaikan studi di FKIP Program Studi Fisika.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang telah membantu dan membimbing selama penelitian.
8. Kakakku tercinta Widia Ferawati dan Andik Nurdiansyah, serta pamanku Hirlen Ilham atas curahan kasih sayangnya.
9. Teman-temanku angkatan 2006, juga teman yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, Mei 2011

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB. 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul.....	9
1.3 Ruang lingkup permasalahan.....	10
1.4 Rumusan Permasalahan.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>BAB. 3 METODE PENELITIAN</b> .....	19
<b>BAB. 4 Gambaran Umum Kabupaten Bondowoso</b> .....	26
4.1 Keadaan Geografis Bondowoso.....	26
4.2 Kehidupan Sosial – budaya.....	27
4.2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk.....	27
4.2.2 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	28
4.2.3 Agama.....	29
4.2.4 Kesenian.....	30

## **BAB. 5 Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso Tahun**

<b>1999-2009</b> .....	33
5.1 Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso.....	33
5.2 Produk Peraturan Daerah Pemerintahan Kabupaten Bondowoso.....	38
5.2.1 Bidang pemerintahan.....	39
5.2.2 Bidang Ekonomi.....	44
5.2.3 Bidang Sosio-Budaya.....	47
5.3 Implementasi Kebijakan Ekonomi Pada Masa Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso .....	49
5.3.1 Kondisi Ekonomi Masyarakat Bondowoso.....	49
5.3.2 Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah di Bidang Ekonomi.....	55
5.3.3 Aspek-aspek Pendukung Potensi Ekonomi Masyarakat .....	58

## **BAB. 6 Perkembangan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten**

<b>Bondowoso Tahun 1999-2009</b> .....	73
6.1 Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso.....	73
6.1.1 Kebijakan di bidang sosial dan budaya.....	73
6.1.2 Kebijakan di bidang ekonomi.....	79
6.2 Dampak Diberlakukannya Otonomi Daerah bagi Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Bondowoso.....	88

## **BAB. 7 Penutup**.....

7.1 Kesimpulan.....	97
7.2 Saran.....	99

## **DAFTAR PUSTAKA**.....

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**.....

105

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1. Tabel 4.1 Penggunaan Lahan kabupaten Bondowoso tahun 2009.....	27
2. Tabel 4.2 Lembaga pendidikan yang ada di kabupaten Bondowoso tahun 2009..	29
3. Tabel 4.3 Penduduk menurut Agama tahun 2009.....	30
4. Tabel 5.1 Perkembangan kecamatan di kabupaten Bondowoso tahun 1990-2005.....	35
5. Tabel 5.2 Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan Kabupaten Bondowoso tahun 2009 .....	52
5. Tabel 5.3 Perbandingan Struktur Ekonomi Kabupaten Bondowoso tahun 2000-2009.....	52
6. Tabel 5.4 Pendapatan domestik regional bruto, pendapatan perkapita, dan inflasi tahun 1999 2009.....	54
7. Tabel 5.5 Ringkasan realisasi APBD pemerintah kabupaten Bondowoso tahun 2009.....	55
8. Tabel 5.6 Perusahaan pemegang Surat Ijin Usaha (SIU) tahun 2000-2009.....	65
9. Tabel 5.7 Perusahaan di kabupaten Bondowoso 2000-2009.....	65
10. Tabel 5.8 perkembangan telepon umum dan wartel tahun 2000-2004.....	68
11. Tabel 6.1 Pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Bondowoso selama masa otonomi daerah.....	89
12. Tabel 6.2 Pertumbuhan ekonomi kabupaten Bondowoso Tahun 2000-2009 Atas Dasar Harga Konstan 2000.....	90
13. Tabel 6.3 Penduduk kabupaten Bondowoso berdasarkan kepala keluarga (KK) tahun 2009.....	92
14. Tabel 6.4 Banyaknya Koperasi menurut jenisnya tahun 2000-2009.....	94
15. Tabel 6.5 Banyaknya pencari kerja yang telah ditempatkan berdasarkan lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan tahun 2009.....	96

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan suatu usaha untuk peningkatan kualitas masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera dan kukuh kekuatan moral dan etikanya (Litbang, 2000:6)

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia diarahkan pada pengembangan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah. Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, Provinsi dan kabupaten/kota yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah hanya merupakan kepanjangan tangan dari pusat di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Ryaas Rasyid dalam LIPI, 2007:4).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang pemerintahan daerah, memberikan peluang terciptanya otonomi daerah. Otonomi daerah dengan konsep kewenangan otonomi kepada kabupaten/kota didasarkan pada desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab meliputi semua bidang